
J E T L R

Journal of Eduaction, Teaching and Learning Research

<https://ojs.aeducia.org/index.php/jetlr>

Pluralisme Narasi Sejarah dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah: Studi Kasus Sejarah PRRI di Sumatera Barat

Een Syaputra¹

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Article Info

History Articles:

Received:
January 03, 2025
Accepted:
January 15, 2025
Published:
January 25, 2025

Keywords:

Historical narrative
pluralism, History Learning,
Revolusionarry Government
of Republic Indonesia.

Abstract

The pluralism of historical narratives in Indonesian historiography presents its own challenges for teachers, whether to convey the official or competing versions. This article aims to discuss PRRI as a case of historical narrative pluralism in Indonesia. The three main questions to be answered are: 1) what is the history of PRRI according to the official narrative; 2) what is the rival narrative version of PRRI's history; and 3) what are the implications for history learning in schools. From the research carried out, it is explained that in the official narrative, PPRI is referred to as a form of disobedience, resistance and betrayal of the region (especially West Sumatra) to the central government. On the other hand, in several counter narratives, PRRI is said to be a form of correction from the regions to the central government which is considered unfair in carrying out development so that there is no intention to break away from the Republic of Indonesia. The existence of this kind of pluralism of historical narratives has implications for history learning in schools, where teachers must strictly adhere to the principles of neutrality and objectivity. Teachers must convey information in a balanced and data-based manner. Apart from that, to raise students' historical awareness, teachers can also ask emancipatory questions.

✉ Correspondence address:

Jl. Raden Fattah, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu.
E-mail: eensyaputra23@gmail.com

p-ISSN
e-ISSN

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan unsur penting dalam membangun kesadaran nasional sebuah bangsa, terlebih lagi untuk kalangan para pelajar (Kartodirdjo, 2014; Hasan, 2013). Adapun dalam rangka pembangunan kesadaran tersebut, pengajaran sejarah melalui sekolah-sekolah memegang peran penting—karena melalui pengajaran inilah kemudian sejarah menjadi populer atau dikenal oleh masyarakat secara luas (Syaputra, 2019). Oleh sebab itu, pembelajaran sejarah dianggap sebagai mata pelajaran yang memainkan peran penting dalam pembentukan watak dan karakter bangsa. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hasan (2013) bahwa pembelajaran sejarah di SMA bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik sebagai warga negara, kesadaran sejarah, memori kolektif sebagai sebuah bangsa, nasionalisme, Bhineka Tunggal Ika, kekuatan sebagai bangsa dan kemampuan berpikir historis.

Tetapi, yang kemudian sering menjadi persoalan ialah bahwa yang diajarkan dalam pembelajaran sejarah disekolah hanyalah merupakan *capita salekta* dari sejarah Indonesia. Dengan demikian, maka yang diajarkan hanyalah peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan bermakna. Adapun ukuran, dari penting-bermakna atau tidak penting-tidak bermakna tersebut juga sangat tergantung pada penguasa (Darmawan, 2010).

Persoalan lainnya yang kemudian muncul ialah soal narasi sejarah. Dalam kasus sejarah nasional Indonesia, narasi sejarah tentang suatu peristiwa tertentu sering mengalami perbedaan, terutama antara *grand narasi* atau versi resmi dengan narasi tandingan atau yang dalam banyak literatur disebut dengan topik/isu

kontroversial. Dalam beberapa kasus perbedaan narasi antara versi resmi dengan versi tandingan tersebut bahkan terjadi sangat kontras (Nordholt, Purwanto & Saptari, 2013). Dengan terjadinya pluralisme narasi atau adanya topik-topik kontroversial tersebut, maka permasalahan yang kemudian muncul ialah soal praksis pengajarannya di sekolah. Disinilah kemudian terjadi dilema dikalangan pendidik, antara menyampaikan narasi versi resmi atau narasi versi tandingan.

Salah satu kasus dari pluralisme narasi tersebut adalah soal sejarah PRRI di Sumatera. Dalam narasi resmi—terutama sekali pada masa Orde Baru, disebutkan PRRI merupakan sebuah pemberontakan, sebuah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun dari pihak lain, terutama dalam kacamata masyarakat Sumatera Barat, gerakan tersebut merupakan sebuah koreksi terhadap pemerintah pusat yang dinilai sudah menyalahi konstitusi, bukan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Di dalam pembelajaran sejarah Indonesia, materi tentang PRRI termasuk dalam sejarah kontemporer yang akan diajarkan kepada siswa kelas, tepatnya pada topik pergolakan daerah pasca perang kemerdekaan, bersama-sama dengan peristiwa lain seperti DI/TII, RMS, Pemberontakan Andi Aziz dan lain-lain. Sebagai salah satu tema kontroversial, mengajarkan tema PRRI kepada siswa merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi guru, yang jika salah strategi akan dapat berakibat tidak baik. Namun pada sisi yang lain hal ini juga memberikan sebuah peluang untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Logtenberg et al (2023) bahwa

mengajarkan tema kontroversial dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang perbedaan perspektif di masa lalu. Dengan demikian, maka yang sebenarnya diperlukan adalah pemahaman terhadap cara atau strategi pengajarannya di sekolah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas pluralisme narasi tersebut dengan mengambil sejarah PRRI di Sumatera Barat sebagai fokus. Dengan demikian, maka beberapa hal yang akan di bahas ialah: 1) PRRI dalam narasi resmi atau grand narasi; 2) sejarah PRRI dalam narasi tandingan; dan 3) implikasinya terhadap pembelajaran sejarah di sekolah.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reserach) dengan pendekatan analisis deskriptif, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengola data penelitian (Zed, 2008). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi sumber data penelitian dari bahan-bahan koleksi perpustakaan saja (tanpa observasi dan wawancara), terutama berupa buku, artikel jurnal, majalah ilmiah, media massa, laporan penelitian, dan makalah. Untuk sumber berupa buku, buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI dan buku teks Sejarah SMA akan menjadi salah satu sumber utama untuk melihat narasi resmi.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) menyiapkan alat dan perlengkapan; 2) menyusun bibliografi kerja; 3) mengatur waktu penelitian; 4) membaca dan membuat catatan penelitian; dan 5) menyimpulkan

dan menganalisis hasil penelitian (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PRRI versi Narasi Resmi

Menurut versi resmi, PRRI di Sumatera Barat bermula dari ketidakpuasan daerah terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pusat. Namun, dalam perkembangan selanjutnya mereka bukan hanya tidak puas, tetapi juga tidak menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Dan karena mengubah pemerintah dengan jalan perlementer tidak berhasil, maka mereka menempuh jalan extraparlementer. Gerakan-gerakan ini kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa panglima yang kemudian berujung pada pembentukan dewan-dewan. Untuk daerah Sumatera Barat, dewan yang dibentuk diberi nama Dewan Banteng. Dewan ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Husen (Poesponegoro & Notosusanto, 1993:272).

Setelah pembentukan dewan tersebut, melalui sidang Pemerintah Daerah, meraka kemudian mengajukan sejumlah usul, yang diantaranya ialah supaya: 1) daerah diberi otonomi seluas-luasnya; 2) peninjauan kembali mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah; 3) dibentuk suatu Komando Pertahanan Daerah; 4) ex-Divisi Banteng dijadikan suatu Korps dalam Angkatan Darat. Hasil pertemuan ini kemudian dilaporkan ke Jakarta melalui Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakarudin dan Ali Lubis sebagai deligasi (Poesponegoro & Notosusanto, 1993:273).

Di Jakarta, deligasi ini berhasil bertemu dengan PM Ali Sastroamidjojo serta Moh. Hatta dan Mr. A.G. Pringgodigdo

namun gagal untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Sementara usaha untuk menemui presiden gagal, Kolonel Ahmad Husein di Sumatera mengambil keputusan dengan mengambil-alih pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Oleh pusat, tindakan Husein tersebut dinilai telah melanggar hukum. Sejak itu pula timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dengan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat sempat mengirimkan utusan guna melakukan berbagai perbincangan dengan Dewan Banteng namun gagal karena Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari Kepala Negara (Poesponegoro & Notosusanto, 1993).

Keadaan kemudian menjadi semakin ketika terjadinya peristiwa usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Dalam keadaan yang semakin kacau inilah, usaha-usaha daerah untuk memisahkan diri dari NKRI semakin menjadi jelas terlihat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng, Achmad Husein mengeluarkan ultimatum pada Pemerintah Pusat supaya Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 × 24 jam. Mendengar ultimatum tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Achmad Husein bersama panglima-panglima lainnya yang terlibat (Djamhari, 2012:313).

Tidak hanya itu, pada tanggal 12 Februari 1958, KSAD A.H. Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan daerah Komando Militer Daerah Militer Sumatera Tengah dan selanjutnya menempatkannya langsung di bawah KSAD.

Tiga hari berselang, yakni pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Karena menganggap usaha melalui musyawara tidak berhasil, maka untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Operasi gabungan AD-AL-AU ini selanjutnya dinamakan operasi 17 Agustus. Dengan kekuatan yang besar, PRRI kemudian dalam dipatahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan sejarah PRRI, narasi yang berkembang luas— dan yang kemudian melekat menjadi ingatan kolektif masyarakat ialah bahwa PRRI merupakan sebuah pemberontakan, sebuah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, sama halnya dengan gerakan-gerakan separatis lainnya seperti DI/TII, APRA, RMS dan Pemberontakan Andi Aziz. Karena sifatnya yang separatis itu, Pusat kemudian memandang PRRI sebagai sebuah bahaya, dan karena itu PRRI harus ditumpas dengan kekuatan militer. Tidak hanya itu, dalam sejarah PRRI versi resmi ada banyak hal yang kemudian tidak ditampilkan, terutama sekali yang berkenaan dengan pra-condition dari munculnya gerakan. Sisi lain seperti penderitaan yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat akibat perang, jumlah korban, dan lain-lain luput—atau mungkin sengaja tidak ditampilkan oleh penulis/peneliti.

Sejarah PRRI dalam Narasi Tandingan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa di luar narasi resmi, biasanya juga lahir narasi-narasi tandingan

dari kelompok pinggiran. Dalam kasus sejarah PRRI, khususnya untuk daerah Sumatera Barat, narasi-narasi tandingan tersebut juga banyak ditemukan. Berbeda dengan narasi resmi yang hanya memandang PRRI sebagai sebuah gerakan separtis tanpa alasan yang jelas, narasi-narasi tandingan yang lahir justru mengemukakan hal yang sebaliknya—dimana PRRI dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal bahkan sebagai bentuk dari kecintaan terhadap NKRI (Zed, 2001:152). Tidak hanya itu, narasi tandingan yang muncul juga memberikan ruang pandang yang lebih besar—dalam artian tidak hanya menyoroti satu sisi saja, melainkan dari berbagai sisi pandang.

Menurut versi ini, lahirnya PRRI bukanlah sebuah gerakan yang terjadi tiba-tiba, melainkan mempunyai akar yang jauh ke belakang. Pada bidang militer, gerakan bermula ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) pada tahun 1949, dimana terjadi penyederhanaan struktur ketentaraan dan pengurangan jumlah pasukan (Asnan, 2007). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka ribuan tentara dikembalikan menjadi masyarakat biasa—dan dengan itu pula terjadi terjadi kekecewaan dari para bekas terntara—dimana mereka merasa “habis manis sepah dibuang” oleh pemerintah pusat. Hal yang sama juga dirasakan oleh para perwira yang diturunkan pangkatnya. Pada bidang politik, penyebab gerakan bermula dari penolakan empat calon Gubernur Sumatera Tengah yang diajukan oleh DPRST pada tahun 1950—yang kemudian berujung pada pembekuan DPRST oleh pemerintah (Zed, 2014:166). Adapun pada bidang ekonomi, gerakan

disebabkan oleh ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah, dimana pemerintah sangat sentralistik—sementara 60% devisa berasal dari daerah (Hastuti, 2014:185).

Persoalan-persoalan tersebut kemudian bermuara pada reuni 612 orang ex-Divisi Banteng padatanggal 21-24 November 1956. Secara umum hasil reuni ialah untuk memperjuangkan nasib para pejuang dan rakyat—dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dibentuklah Dewan Banteng dengan Achmad Husein sebagai ketuanya (Djamhari, 2012:307). Selain Husein sebagai ketua, juga dibentuk kepengurusan lainnya sebagai anggota. Adapun sebagai tidak lanjut dari hasil reuni tersebut, Dewan Banteng—dalam hal ini melalui Husein—kemudian mengambil tindakan dengan mengambil-alih pemerintahan dari Gubernur Roeslan Muljohardjo pada tanggal 20 Desember 1956 (Kahin, 2008:281).

Setelah itu, Dewan Banteng kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat. Beberapa tuntutan tersebut adalah supaya: 1) otonomi yang seluas-luasnya dan pembangunan Sumatera Tengah; 2) di daerah Sumatera Tengah dibentuk Komando Pertahanan Daerah; 3) Devisi Banteng yang telah bubar dijadikan suatu korps dalam Angkatan Darat. Oleh pemerintah pusat dan juga pimpinan Angkatan Darat, tuntutan tersebut dinilai tidak rasional—sehingga mendapat tentangan. Adapun deligasi Dewan Banteng yang dikirim ke pusat untuk menyampaikan tuntutan juga tidak berhasil menemui Presiden Soekarno. Mereka hanya berhasil bertemu dengan PM. Ali Sastroamidjojo, ex-Wakil Presiden Moh.

Hatta dan Menteri Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodigdo (Asnan, 2007:184).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah pusat sempat mengirim beberapa utusan ke Sumatera Barat guna melakukan pendekatan. Namun sayang, pendekatan tersebut tidak berhasil mencapai titik temu. Pusat selanjutnya mengabaikan tuntutan daerah begitu saja, sementara daerah—dalam hal ini Dewan Banteng semakin giat berusaha mencari simpati rakyat. Berbagai kegiatan seperti Kongres Adat se-Sumatera, Kongres Alim Ulama se Sumatrera, dan lain-lain.¹⁸ Dan karena tuntutan pertama tidak mendapat tanggapan, maka pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng, Achmad Husein mengeluarkan ultimatum pada Pemerintah Pusat supaya Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 × 24 jam. Mendengar ultimatum tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Achmad Husein bersama panglima-panglima lainnya yang terlibat. Puncaknya adalah pada tanggal 15 Februari 1958. Karena merasa tidak dihiraukan oleh Pusat, Ahmad Husein kemudian mengambil tindakan dengan memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Bukittinggi sebagai Ibu Kota. Dengan demikian, maka tertutuplah jalan kompromi antara kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah-pun tidak tanggung-tanggung. Jakarta mengeluarkan semua kekuatan bersenjata (AD-AU-AL) untuk menumpas PRRI (Zed, 2009). Dengan kekuatan tempur yang besar, pemerintah pusat akhirnya dapat mematahkan pertahanan PRRI dalam waktu yang terlalu lama. Adapun korban yang jatuh akibat perang saudara ini adalah sangat luar biasa. Sebagaimana

diungkapkan oleh Zed (2009:8) bahwa dari pihak pemerintah sebanyak 983 orang terbunuh, 1.695 luka-luka, dan 154 hilang. Adapun dari pihak PRRI sebanyak 6.373 terbunuh, 1.201 luka-luka dan tertangkap serta 6.057 lainnya menyerah.

Seperti yang diungkapkan Mestika Zed, bahwa perlawanan PRRI bukanlah gerakan separatis sebagaimana digeneralisasikan dengan kebanyakan tipe pergolakan daerah selama tahun 1950-an. Menurutnya, PRRI hanyalah sebuah koreksi keras terhadap pemerintah pusat yang dipandang melakukan pelanggaran konstitusi (Zed, 2001:1). Lebih lanjut Zed mengemukakan beberapa bukti seperti tuntutan PRRI untuk mengganti Kabinet Baru dengan Moh. Hatta dan tokoh Jawa Sri Sultan Hamengkubowono IX. Selain itu, PRRI juga tidak pernah mengganti simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, lagu kebangsaan, atau yang lainnya. PRRI, menurutnya, justru lahir karena dorongan nasionalisme dan patriotisme (Zed, 2009).

Implikasi terhadap Pembelajaran Sejarah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sejarah PRRI merupakan salah satu contoh dari pluralnya narasi sejarah Indonesia. Sebagian besar masyarakat—terutama “produk” tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, misalnya berpandangan bahwa PRRI merupakan sebuah pemberontakan. Namun, kajian-kajian mutakhir—khususnya pasca reformasi, menunjukkan bahwa PRRI pada dasarnya merupakan sebuah gerakan menentang pemerintah pusat, sebuah gerakan yang menginginkan sebuah reformasi, meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan tersebut, pada batas-batas tertentu juga memperlihatkan praktek-praktek yang tidak wajar. Namun, terlepas dari itu

semua, bagi masyarakat Sumatera, khususnya Sumatera Barat, periode PRRI tersebut merupakan sejarah kelam, sebuah trauma masa lalu. Dan yang terpenting, ialah bahwa hal tersebut kemudian menjadi memori kolektif, dimana ini kemudian juga berpengaruh terhadap *mind set* dan *world view*.

Lalu kalau begitu bagaimana dengan pengajaran sejarah di sekolah? Akankah selamanya pembelajaran sejarah terjebak pada “aksi” salah menyalahkan dan sikap saling dendam? Bukankah kita dianjurkan untuk belajar dari sejarah atau menjadikan sejarah sebagai guru kehidupan?

Keberagaman narasi tersebut pada dasarnya bukanlah sebuah permasalahan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan serta kemampuan berpikir kritis. Hanya saja, diperlukan strategi khusus dalam pengajarannya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan antara lain:

Pertama, guru haruslah bersifat netral, tidak melakukan provokasi, apalagi menanamkan rasa benci kepada pihak-pihak tertentu. Selain itu, guru juga harus menyampaikan informasi secara objektif, dalam artian tidak melebih-lebihkan salah satu versi. Siswa selanjutnya dipersilahkan untuk melakukan interpretasinya sendiri-sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Wiriaatmadja (2022) yang menjelaskan bahwa prinsip netralitas adalah prinsip dimana guru menekan pandangannya sendiri tentang isu-isu tersebut sehingga tidak berupaya memberikan doktrin pendapatnya terhadap siswa. Lebih lanjut Sjamsudin (2012) menjelaskan bahwa berkenaan dengan prinsip netralitas, guru sedapat mungkin bersikap netral terhadap opini yang berbeda, yang berkembang

dalam diskusi ataupun bias yang telah dibawa para siswa dari luar, meskipun pada hakekatnya guru-guru juga mempunyai pendirian sendiri.

Kedua, berkaitan erat dengan yang pertama, penting disini untuk memilih strategi pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Siswa dipersilahkan untuk menggali sendiri informasi, lalu mendiskusikannya dengan sesama anggota kelas. Adapun yang terpenting dalam proses diskusi tersebut ialah bukan mencari siapa yang salah atau yang benar, melainkan menghubungkannya dengan permasalahan kontemporer saat ini, lalu mencari solusinya. Berkenaan dengan itu pula, penggunaan konsep dan pertanyaan emasipatoris dalam teori kritis Hubermas agaknya menjadi tepat untuk digunakan.

Sebagai contoh misalnya, setelah siswa melakukan penggalian informasi dan juga melakukan diskusi seputar PRRI, guru bisa bertanya kepada siswa dengan pertanyaan: Jika anda saat itu ada dalam posisi Kolonel Ahmad Husen, apa yang akan anda lakukan? Atau jika anda ada dalam posisi Soekarno dan A.H. Nasution apa yang akan anda lakukan terhadap PRRI? Selain itu menjadi penting juga untuk menghubungkannya dengan persoalan masa kini, misalnya dengan pertanyaan: Jika suatu saat anda menjadi Presiden atau Gubernur, pelajaran apa yang anda bisa ambil dari kasus PRRI? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa yang bisa ditanyakan. Dengan pertanyaan semacam itu, maka pembelajaran sejarah diharapkan akan dapat menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini sehingga siswa akan dapat merasakan secara langsung relevansi atau kegunaan dari belajar sejarah dalam hidup kekinian mereka.

PENUTUP

PRRI merupakan salah satu contoh dari kontroversial isu atau pluralism narasi sejarah dalam historiografi Indonesia. Dalam narasi resmi, PRRI disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, perlawanan, dan penghiatanan daerah (khususnya Sumatera Barat) kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam beberapa narasi tandingan, PRRI disebut sebagai sebuah bentuk koreksi dari daerah kepada pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dalam melakukan pembangunan sehingga tidak ada niat untuk melepaskan diri dari NKRI.

Adanya pluralism narasi tersebut berimplikasi kepada pembelajaran sejarah di sekolah, dimana guru harus memberikan pengajaran yang netral, menampilkan data yang berimbang dengan mengutamakan prinsip objektivitas serta tidak melakukan indoktrinasi. Selain itu, materi kontroversial seperti sejarah PRRI juga dapat dijadikan bahan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa serta membentuk kesadaran akan perbedaan tafsir tentang masa lalu.

REFERENSI

- Asnan, G. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Darmawan. W. (2010). Historiography Analysis of History Text Book from Neerlandocentric to Scientific dalam *Historia: International Journal of History Education*, 11 (2).
- Djamhari, S.A. (2012). Peristiwa PRRI-Permesta. dalam Taufik Abdullah & AB. Lopian (ed). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Yogyakarta: PT Ichtiar Baru van Houpe.
- Hasan, S.H. (2012). Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. *PARAMITA: Historical Studies Journal*, 22 (1), 81-95.
- Hastuti, H. (2014). Nagari Paninggahan pada Masa PRRI: 1958-1961. *Jurnal Diakronika*, 14 (2), 184-195.
- Kahin, A. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dalam Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Logtenberg, A., Savenije, G., de Bruijn, P., Epping, T., & Goijens, G. (2024). Teaching sensitive topics: Training history teachers in collaboration with the museum. *Historical Encounters*, 11(1), 43-59.
- Nordholt, H.S., Purwanto, B., & Saptari, R (ed). (2013). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta.
- Poesponegoro, M.D., & Notosusanto, N (ed).. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjamsudin, H. (2012). Model Pendekatan Pembelajaran Sejarah Dari Isus-Isu Kontroversial, Sejarah-Komparatif Ke Analisis Tekstual. *Agastya*, 2 (1), 11-21.
- Wiriaatmadja, R. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press, FPIPS UPI
- Zed, M. (2008). *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Obor.
- Zed, M. (2001). *PRRI, Sebuah Antikilamks Dari Gerakan Rakyat Menentang Regim Otoriter*. Makalah disajikan dalam konvensi Mahasiswa Sumatera. Padang, 25 Maret 2001.

- Zed, M. (2009). *Keterlibatan CIA dalam Kasus PRRI*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang Sejarah PRRI. Padang, 14 Maret 2009.
- Zed, M. (2014). Sentralisme dan Perlawanan Daerah: Dialektika Sejarah Perjalanan Bangsa Pasca Kolonial 1945-2005. *Jurnal TINGKAP*, 10 (2).
- Zed, M., & Chaniago, H. (2001). *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.